

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul merupakan salah satu kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejarah Bantul tidak terlepas dengan riwayat DIY sebagai kota perjuangan yang bersama dengan daerah-daerah lainnya memperjuangkan persatuan Negara Republik Indonesia. Berbagai kisah kepahlawanan tercatat sejarah di kota ini. Kisah itu antara lainnya adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang, upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret serta perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Selain itu kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto dengan kejadian ditembaknya pesawat yang ditumpanginya oleh Belanda sehingga jatuh di Desa Ngoto. Peristiwa lainnya yang tidak kalah penting adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman (1948) yang mana menjadikan Bantul sebagai basis dari, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. (<http://www.bantulkab.go.id>, [Diakses Tanggal 20 Februari 2017, Jam 20:28 WIB](#))

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah

Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptan tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan

stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999-2004. Pada Tahun 2005, Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan periode selanjutnya yaitu tahun 2010-2015. Tahun 2015, pada pilkada serentak Hj. Sri Surya Widati kembali mencalonkan diri sebagai petahana namun kekuasaannya berhasil direbut oleh Drs. H. Suharsono. Suharsono bersama wakilnya Abdul Halim Muslih dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021 pada Rabu, 17 Februari 2016. (<http://www.bantulkab.go.id>, [Diakses Tanggal 20 Februari 2017, Jam 20:30 WIB](#))

2. Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 955.051 jiwa yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasih	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
	Jumlah	475.872	479.143	955.015
	Presentase	49,83	50,17	100

(Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Sumber: www.bantulkab.go.id diakses tanggal 20 Februari 2017, Jam 21.07 WIB

3. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desanya di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.2

Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km ²)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber : www.bantulkab.go.id Diakses Tanggal 20 Februari 2017, Jam 21.21

WIB

4. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu: “Bantul Projotamansari Sejarah, Demokrasi, dan Agamis.” Adapun visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi merupakan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
- b. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan (<http://www.bantulkab.go.id>, [diakses Tanggal 20 Februari 2017, Jam 21:32 WIB](#))

5. [Kondisi Politik Kabupaten Bantul](#)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik awal dari otonomi daerah atau desentralisasi. Melalui undang-undang ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka DPRD Kabupaten Bantul memilih Drs. HM. Idham Samawi sebagai Bupati periode 1999-2004. Pemilihan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 17 bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah.

Pada tahun 2005 Drs. HM. Idham Samawi mencalonkan kembali menjadi Bupati Kabupaten Bantul melalui partai politik PDIP. Beliau terpilih melalui pemilihan langsung dan menjabat hingga tahun 2010. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, Drs. HM. Idham Samawi tidak dapat lagi maju sebagai kandidat, dikarenakan undang-undang membatasi kepemimpinan kepala pemerintahan yang hanya dua periode. Kemudian istri beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan diri dan memenangkan pilkada untuk periode 2010-2015,

yang diusung melalui partai politik PDIP. Hj. Sri Surya Widati maju kembali di pilkada serentak tahun 2015 yang diusung dari PDIP dan Nasdem. Beliau berpasangan dengan Drs. Misbakhul Munir, M.Si. Namun pilkada serentak tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih, yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat. Untuk Data Pemilih Tetap pilkada serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel
	L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	Total (%)
1.768	337.716	352.729	0	691.445	6.038	5.956	11.994 (1,73 %)	3.863 (0,19%)

Sumber: www.kpud-bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 20 Februari 2017 Jam 21.41 WIB)

Perolehan suara pada pilkada serentak Kabupaten Bantul tahun 2015 yaitu: Drs. H. Suharsono dan H. Abdul. Halim Muslih, mendapatkan perolehan 260834 suara (52,80%) pasangan Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si dengan perolehan: 233196 Suara (47,20%) (www.kpud-bantulkab.go.id Diakses Tanggal 20 Februari 2017 Jam 21.43 WIB). Pada tanggal 17 Februari 2016, pasangan Drs. H. Suharsono dan H. Abdul. Halim Muslih telah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul.

Pada pilkada tahun 2005 dan tahun 2010 PDIP menjadi partai yang berkuasa di Kabupaten Bantul, namun pada tahun 2015 melalui pilkada

serentak kekuasaan itu beralih ke Partai Gerindra. Meskipun pada pilkada 2015, kandidat yang diusung oleh PDIP kalah, kekuasaan PDIP masih terlihat mentereng di kursi parlemen. Hasil perhitungan suara PDIP memperoleh 12 kursi anggota dewan, untuk jumlah keseluruhan anggota ada 45 orang. Adapun komposisi anggota DPRD Kabupaten Bantul masa bakti 2014-2019 berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah Anggota
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12 Anggota
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6 Anggota
3	Partai Amanat Nasional	6 Anggota
4	Partai Golongan Karya	5 Anggota
5	Partai Kebangkitan Bangsa	4 Anggota
6	Partai Keadilan Sejahtera	4 Anggota
7	Partai Persatuan Pembangunan	4 Anggota
8	Partai Nasional Demokrat	2 Anggota
9	Partai Bulan dan Bintang	1 Anggota
10	Partai Demokrat	1 Anggota

Sumber: www.dprd.bantulkab.go.id Diakses Tanggal 20 Februari 2017, Jam 21:48 WIB

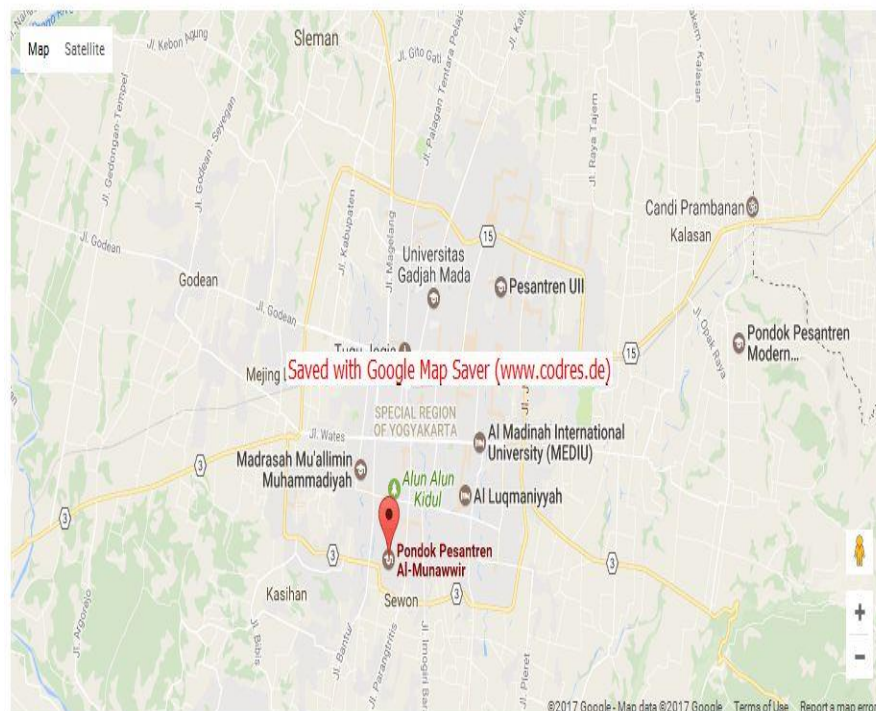
B. Deskripsi Pondok Pesantren Al-Munawwir

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Munawwir

Pondok Pesantren Al-Munawwir didirikan pada tanggal 15 November 1911 M oleh KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad. Semula pesantren ini diberi nama Pesantren Krapyak karena letaknya yang berada di Dusun Krapyak, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Al-Munawwir disematkan pada tahun

1976 untuk mengenang jasa KH Munawwir sebagai pendirinya. Pesantren Al-Munawwir merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dalam istilah pesantren disebut dengan istilah *salaf*. Pesantren salaf ini masih bisa bertahan dan terus mengembangkan kualitasnya di tengah megahnya pendidikan modern.

Gambar 2.1
Peta Lokasi Pesantren Al-Munawwir



Sumber: Google Maps

Pada awalnya didirikannya, Al-Munawwir berfokus pada keilmuan Al-Qur'an namun saat ini telah berkembang pada bidang keilmuan lain khususnya kitab-kitab kuning (*kutubussalafu assholih*) yang kemudian disusul

dengan penerapan sistem madrasah (klasikal) sehingga melahirkan lembaga-lembaga pendidikan antara lain:

- a. Madrasah Salafiyah (I, II, III, IV dan V)
- b. Al-Mahad al-‘Aly
- c. Madrasah Diniyah
- d. Madrasah Huffadh (I dan II)
- e. Majlis Ta’lim dan Majlis Masyayikh

Ernas dan Ferry (2010: 201) menyebutkan bahwa sebelum didirikannya pesantren Al-Munawwir, Krapyak hanyalah dusun kecil yang dihuni penduduk mayoritas menganut Islam Abangan, namun setelah pesantren menjalankan aktivitasnya, syiar Islam berkembang dan jadilah masyarakat di dusun ini sebagai masyarakat religius. Setelah ditinggal wafat oleh KH Munawwir, pesantren ini mengalami kemajuan pesat terutama saat dipimpin oleh KH. Ali Maksum.

Kemajuan pesat dibawah pimpinan KH. Ali Maksum salah satunya ditandai dengan pesantren ini menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-28. Muktamar itu berhasil merumuskan secara fundamental gagasan pokok tentang depolitisasi NU, yakni kembali ke Khitah 1926 sebagai organisasi atau *jam'iyah* sesuai putusan pada Muktamar Situbondo. Muktamar ini menunjukkan bahwa di bawah pimpinan KH Ali Maksum Pesantren

Krapyak memiliki pengaruh dan eksistensi yang cukup besar diantara pesantren-pesantren NU lainnya.

Saat ini Pesantren Al-Munawwir dipimpin atau diasuh oleh KH. R. M. Najib Abdul Qodir yang mengasuh 13 kompleks pesantren putra dan 4 kompleks pesantren putri yang masing-masing kompleks tersebut diasuh oleh kiai yang berbeda-beda. Setiap kompleks mempunyai konsentrasi keilmuan khusus dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan disepakati. Setiap santri yang bermukim di setiap kompleks wajib mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Munawwir

Sejak awal diberdirikannya hingga saat ini Pesantren Al-Munawwir telah dipimpin secara estafeta oleh 6 orang kiai yang dibawah kepemimpinannya telah memberikan dinamika tertentu. Enam orang kiai tersebut adalah:

a. KH. Muhammad Munawwir (1910-1942 M)

Kondisi masyarakat Dusun Krapyak yang saat itu merupakan kaum abangan menjadi alasan pesantren ini didirikan dan terus menyebarkan syiar agama agar masyarakat menuju ke jalan yang lurus (Islam). Pada masa ini pengajaran ditekankan pada kajian Al-Qur'an sesuai dengan keahlian KH Munawwir. Pengajaran kitab kuning (klasik) juga diadakan sebagai pelengkap keilmuan pesantren. Metode pengajaran yang digunakan oleh KH. Munawwir adalah dengan metode *mushafahah* yaitu santri membaca Al-Qur'an satu

persatu di hadapan beliau lalu kemudian jika terjadi kesalahan, beliau langsung memperbaikinya.

b. KH. Abdullah Affandi Munawwir dan KH. R. Abdul Qodir Munawwir (1941-1968 M)

Pada hari Jum'at 6 Juni 1942 M, KH Munawwir menghembuskan nafas terakhirnya yang kemudian kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh KH. Abdullah Affandi Munawwir dan KH. Abdul Qodir Munawwir. Pada masa ini pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an dikelompokkan dalam satu wadah yang diberi nama Madrasah Huffadh yang didirikan oleh KH. R. Abdul Qodir Munawwir dengan dibantu oleh para menantu beliau dan didukung oleh keluarga besar Al-Munawwir pada tahun 1955 M. Pendidikan dan pengajaran kitab kuning dipercayakan kepada KH. Ali Maksum.

c. KH. Ali Maksum (1968-1989 M)

Pesantren Al-Munawwir mengalami kemajuan yang pesat pada masa beliau. KH. Ali Maksum dibantu oleh adik-adik ipar beliau serta para santri senior. Pengajian santri putra dilaksanakan di aula AB yang dipimpin oleh KH. Ahmad Munawwir sedangkan untuk santri putri diselenggarakan di komplek Nurussalam yang dipimpin oleh Nyai Hj. Hasyimah Ali Maksum. Pengajaran kitab kuning dan lembaga pendidikan pada masa ini berkembang dengan berdirinya:

1). Madrasah Tsanawiyah 3 tahun untuk putra (1978 M)

2). Madrasah Aliyah 3 tahun untuk putra (1978 M)

- 3). Madrasah Tahassus Bahasa Arab dan Syari'ah
- 4). Madrasah Tsanawiyah untuk putri (1987 M)
- 5). Madrasah Aliyah untuk putri (1987 M)

Dibentuk juga Majelis Ta'lim yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Ma'had Al-'Aly Al-Munawwir.

d. KH. Zainal Abidin Munawwir (1989-2014)

Pada masa ini jumlah santri semakin meningkat dan lembaga pendidikannya juga bertambah dengan didirikannya Madrasah Huffadh I dan II, Madrasah Salafiyah I-V, perguruan tinggi ilmu salaf Al-Ma'had Al-'Aly, Majelis Ta'lim dan Majelis Masyayikh. Dalam mengelola dan mengembangkan pesantren ini, KH. Zainal dibantu oleh kakak, adik dan keponakan-keponakan beliau, yaitu: KH. Zaini Muunawwir (Al-Qur'an), KH. Dalhar Munawwir (kitab dan madrasah), KH. Ahmad Warson Munawwir (kitab dan madrasah), KH. Ahmad Munawwir (Al-Qur'an) KH. R.M. Najib 'Abdul Qodir (Al-Qur'an), KH. Masyhuri Aly Umar (kitab dan madrasah) dan KH. Abdul Hafidz Abdul Qodir (Al-Qur'an).

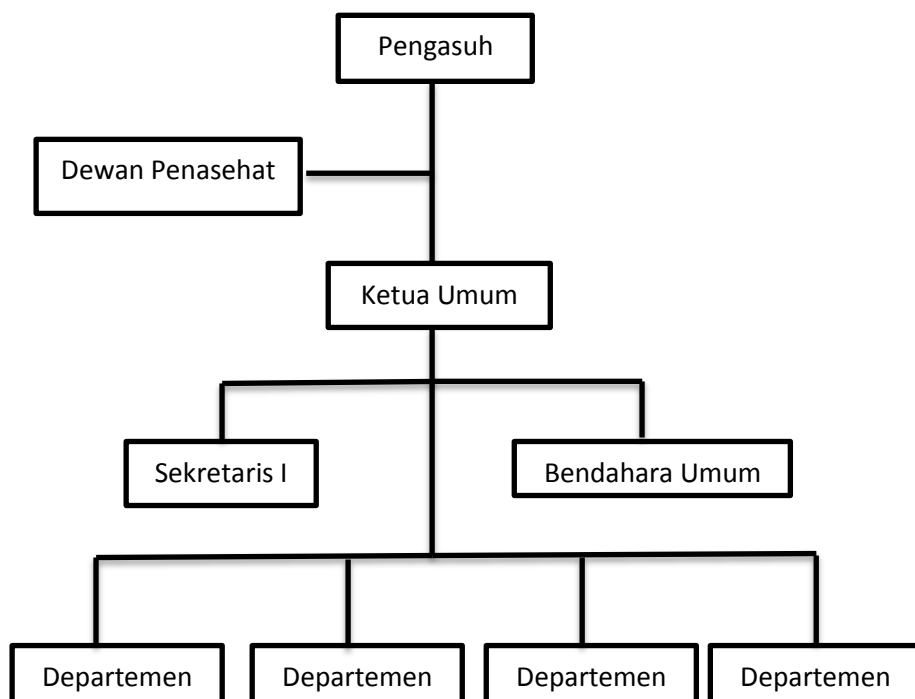
e. KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir (2014-sekarang)

Setelah ditinggal oleh KH. Zainal Abidin Munawwir pada 16 Februari 2014, kepemimpinan diteruskan oleh generasi cucu. Melalui musyawarah dzuriyyah KH. Muhammad Munawwir, disepakati bahwa KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir didaulat menjadi pengasuh pesantren. Pada masa ini

pengajian alumni diasuh oleh Dr. KH. Hilmy Muhammad Hasbullah dan KH. Muhtarom Ahmad selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir (IKAPPAM).

Adapun struktur kepengurusan Pondok Pesantren Al-Munawwir saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pengurus Pesantren Al-Munawwir



Sumber: Sekretariat Pesantren Al-Munnawwir

Lebih lengkapnya akan dituliskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Struktur Organisasi Kepengurusan Pesantren Al-Munawwir Masa
Khidmat 2014-2016 M**

NAMA		JABATAN
KH. R. M. Najib Abdul Qodir		Pengasuh
KH. R. Hafidz Abdul Qodir		Penasehat
KH. Muhtarom Busyro		
KH. Fairuzi Afiq Dalhar		
KH. Fairuz Warson		
KH. Munawwar Ahmad		
KH. R. Chhaidar Muhaimin		
KH. Hilmi Muhammad		
As'ad Syamsul Arifin		Ketua Umum
Akhmad Kharis		Ketua I
Haikal Mubarak		Ketua II
Khamid Fadholi		Sekretaris Umum
Muhammad Sonhaji G.P		Sekretaris I
Anif Fahmi		Sekretaris II
Muhammad Akhyar		Sekretaris III
Abdul Wahid Latif		Bendahara Umum
Ahmad Faridi		Bendahara I
Agung Susilo	Gus Muhammad	Departemen Pendidikan
Mukhlisin	Syukron	
Maulana Abdullah Rifqi	M. Rosyid Yusuf	
Syarif Munawwir Ghozali	Amir Syarifuddin	Departemen Kemesjidan
Quat	Arfan	
Wiwit Santiko	Taufiq	
Wahyu Irfan Syafi'i	Habibi Nur	Departemen Perlengkapan
Ismail	Nawawi	

NAMA		JABATAN
Isep Syaifullah	Sutri Cahyo	Departemen Humas
Rizka Al Bana	Irfan Asyhary	
Gus Khiruzzad	Ahmad Syaiful	
Gus Maulana Muhibbur	Umar Hamdan	
M. Amin Husain		
Zakiyyul Hikam	Muhammad Haidar	Departemen Sosial dan Budaya
Talhis Ifshohi	Alaika Abdi M	
Muhammad Farigh	M. Ikhwan F	
Zidni Aftialuddin		
Muhammad Atidj	Arwan Rosyadi	Departemen Keamanan
Syukron	Gustara Hendra P	
Muhammad Zuhron	M. Syukron F	
Khanifuddin	Mukhson	Departemen Kebersihan dan Kesehatan
Fajri	Faidhulloh M	
Anis Abda R	M. Abdunnur	
Sektiana Wardani	Rifka Zammila	Departemen Keputrian
Adrika Fitrotul A	Novi Khoirunnisa	
Oni Marliyana S	Siti Khotimah	
Mau'idhotul Mahfudhoh	Anna Sulchani	
Titin M		

Sumber: almunawwir.com (diakses 21 Februari 2017 jam 21:58)

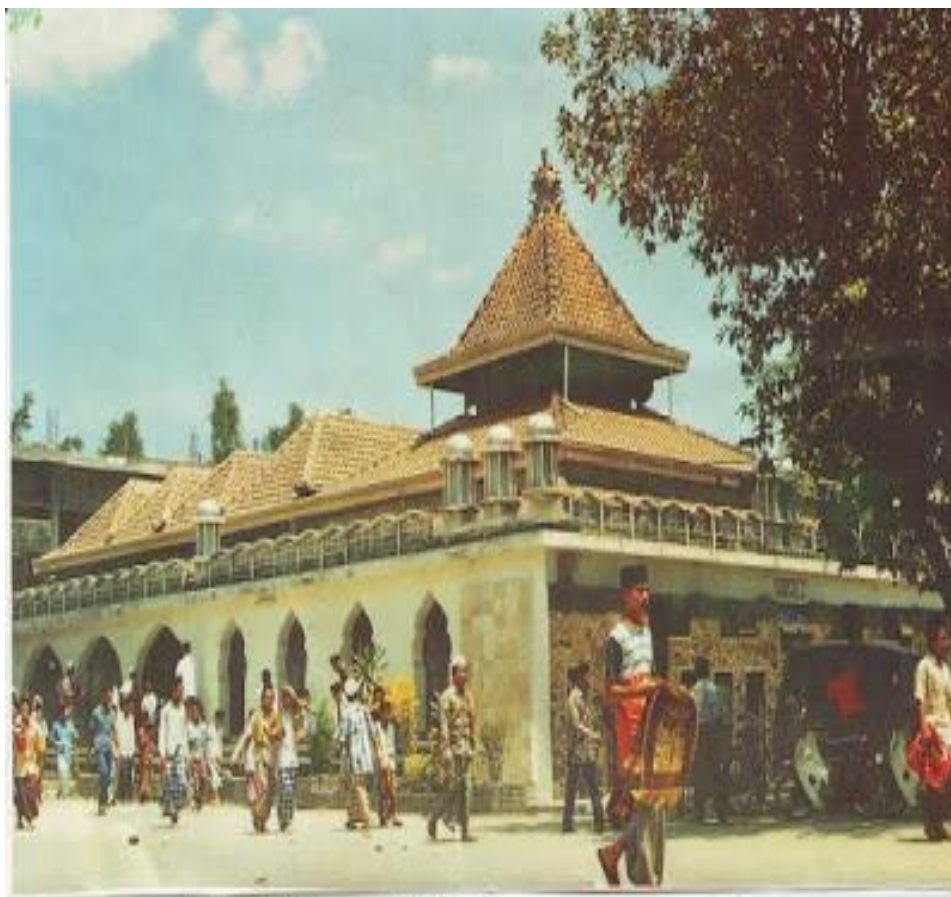
3. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Munawwir

Pesantren Al-Munawwir sebagai lembaga pendidikan tentunya memerlukan fasilitas penunjang dalam melakukan kegiatan pengajian dan pembelajaran. Fasilitas peribadatan juga sangat diperlukan mengingat pesantren selain sebagai lembaga pendidikan adalah merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan tersebut bisa berupa aktivitas rutin setiap hari seperti shalat berjamaah lima waktu dan pengajian umum. Aktivitas lainnya juga bisa bersifat berkala seperti idul adha, idul fitri, peringatan maulid, isra mi'raj dan acara-acara lainnya.

Kegiatan pesantren Al-Munawwir dipusatkan di sebuah mesjid dan tepat di pusat pesantren terdapat sebuah mesjid yang cukup megah bernama Mesjid Al-Munawwir. Sepulangnya KH. Munawwir pasca menetap selama 21 tahun di Tanah Suci, beliau mendedikasikan hidupnya di Krapyak dengan mengajar Al-Qur'an dan ilmu keIslaman lainnya. Pembangunan Pesantren Al-Munawwir dilakukan secara bertahap dimulai dari akses jalan, mesjid, hingga gedung kompleks dengan mengerahkan segenap santri.

Berikut ini adalah mesjid Pesantren Al-Munawwir dari masa ke masa yang menjadi pusat kegiatan Pondok Pesantren Al-Munawwir :

Gambar 2.3 Mesjid Al-Munawwir pada Masa KH. Munawwir



Sumber: Website Pesantren Al-Munawwir (almunawwir.com)

Pada masa kepengurusan KH. Ali Maksum, tepatnya pada tahun 1970-an mesjid ini mengalami pemugaran. Beginilah kondisi mesjid Al-Munawwir pada masa KH. Ali Maksum:

Gambar 2.4 Mesjid Al-Munawwir pada Masa KH. Ali Maksum



Sumber: Website Pesantren Al-Munawwir (almunawwir.com)

Selepas meninggalnya KH. Ali Maksum, Pesantren Al-Munawwir dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Munawwir dan pada tahun 2006 terjadi gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Akibatnya Pesantren Al-Munawwir mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mesjid itu pun turut mengalami renovasi. Pada saat itu dilakukan pemugaran total secara profesional sehingga bangunan mesjid ini menjadi megah dengan tiga lantai dengan seni yang modern. Pembangunan ini diketuai oleh KH.

Warson Munawwir. Beginilah kondisi mesjid Al-Munawwir pasca direnovasi total:

Gambar 2.5 Mesjid Al-Munawwir Pasca Gempa 2006



Sumber: Website Pesantren Al-Munawwir (almunawwir.com)

Pada tahun 2015 Mesjid Al-Munawwir ditetapkan sebagai Mesjid Besar Kecamatan Sewon berdasarkan Keputusan Camat Sewon No. 54 Tahun 2015 sehingga Mesjid Al-Munawwir menjadi mesjid utama Kecamatan Sewon. Selain sebagai tempat sholat, mesjid Al-Munawwir memiliki nilai lebih dengan adanya pondok pesantren di dalamnya yang terintegrasi dengan kegiatan keagamaan umat khususnya di Kecamatan Sewon.

Fasilitas penunjang lainnya yang terdapat di Pesantren Al-Munawwir adalah kompleks-komplek santri yang di setiap kompleknya terdapat kegiatan belajar mengajar atau kajian keagamaan yang diasuh dan diajar langsung oleh kiai. Komplek santri tersebut terdiri dari komplek santri putera dan puteri. Adapun nama-nama komplek tersebut adalah:

Tabel 2.6

Komplek Santri Putera Al-Munawwir

No	Nama Komplek	Pengasuh
1	AB	Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal
2	Arofah	KH. Ijtabahu Rabbuhu
3	CD	Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal
4	EF	Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal
5	GIPA Al Qasim	KH. Agus Mas'udi Fathurrohman
6	IJ	KH. Ahmad Sidqi
7	K1	KH. Muhammad Makfi
8	K2	KH. Ridwan M. Nur
9	L	KH. Muhammad Munawwar
10	M	KH. Muhtarom Busyro
11	Huffadh 1	KH. Najib Abdul Qodir
12	MH 2	KH. Hafidz Abdul Qodir
13	Nurussalam Putra	KH. Fairuzi Afiq Dalhar
14	Padang Jagad	KH. Haidar Muhaimin
15	S	KH. Muhtarom Ahmad
16	T	KH. Munawwir Tanwir

Sumber: Sekretariat Pesantren Al-Munawwir

Tabel 2.7

Komplek Santri Puteri Al-Munawwir

No	Nama Komplek	Pengasuh
1	Nurussalam Putri	KH. Fairuzi Afiq Dalhar
2	Q	Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson
3	R1	Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal
4	R2	Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal

Sumber: Sekretariat Pesantren Al-Munawwir

Saat ini jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah sekitar 1700-an orang. Fasilitas dan lembaga lainnya yang terdapat di Pesantren Al-Munawwir diantaranya adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Al-Munawwir, Sema'an Al-Qur'an, JTMPJP Padang Jagad, Majelis Masyarakat, Ma'had 'Aly, Madrasah Diniyah, majalah Al-Munawwir, serta Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir (IKAPPAM).

Di desa Krpyak terdapat dua Yayasan Pesantren yaitu Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Yayasan Ali Maksum, kebanyakan orang mengenal dua yayasan ini sebagai Pondok Krpyak. Hal ini didasarkan karena keduanya terletak di Desa Krpyak dan sama-sama bergerak di bidang pengembangan pendidikan Islam. Secara historis kedua yayasan ini tidak bisa dipisahkan, KH. Ali Maksum adalah tokoh yang mengembangkan Pesantren Al-Munawwir, beliau meninggal pada tahun 1989 kemudian keturunannya mendirikan Yayasan Ali Maksum.